PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKUD) KABUPATEN PINRANG

Effect Of Government Accounting Standards Internal Control System Against Timeliness Of Financial Reporting In Pinrang District Financial Agency (Bkud)

Elsa Pratiwi
Email : elsapratiwi487@gmail.com
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Pinrang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi, Kuesioner dan Skala Pengukuran. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 66 Responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini yang digunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa: 1) Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Pinrang. 2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Pinrang. 3) Standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Pinrang.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Abstract

This study aims to determine the effect of the adoption of the Government Accounting System and the Internal Control System on the Timeliness of Financial Reporting at the Regional Financial Board (BKUD) of the Regency of Pinrang. The data collection techniques used in this study are Observation, Questionnaire and Measurement Scale. The sample in this study were 66 respondents. Data analysis techniques in this study used multiple linear regression analysis. Based on the results of research that has been done, it shows that: 1) Government Accounting Standards have a positive effect on the timeliness of financial reporting at the Regional Finance Agency (BKUD) of Pinrang Regency. 2) The Internal Control System has a positive effect on the timeliness of financial reporting at the Regional Financial Board (BKUD) of the Regency of Pinrang. 3) Government Accounting Standards and Internal Control Systems have a positive effect on the timeliness of financial reporting at the Regional Financial Board (BKUD) of Pinrang Regency.

Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Timeliness of Financial Reporting

PENDAHULUAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengeloaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Operasional.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai kualitas, dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Fenomena perkembangan pemerintahan di Indonesia saat ini adalah tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlu dilakukannya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas keuangan adalah pemberian informasi atas aktivitas dalam menjaga keakuratan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu (*right to know),* hak untuk diberi informasi (*rightto be informed)* dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to)* (Mardiasmo, 2010).

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi sebagai suatu keadaan psikologis dengan karakteristik, meyakini dan menerima tujuan dan nilai yang dimiliki oleh organisasi, kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh demi organisasi dan mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja dengan penuh dedikasi karena menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang penting (Allen *et al.*, 1993). Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud apabila diikuti oleh komitmen organisasi yang kuat (Ridha dan Basuki, 2012).

Faktor lain yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu sistem pengendalian intern. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah (Drama, 2014).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah, jalan. Bintang, Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai ASN Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang yang berjumlah 66 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuesioner merupakan alat pengumpul data primer yang efisien dibandingkan dengan observasi ataupun wawancara. Semakin tersebar sampelnya, kuesioner cenderung akan lebih rendah biayanya. Dalam kuesioner umumnya dipandang lebih bersifat tidak mengacu pada orang

tertentu, memberikan peluang kepada responden untuk merahasiakan jati diri dari pada cara-cara komunikasi lainnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet. Dalam penentuan skor nilai untuk variabel bebas yakni standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal dan variable terikat yakni ketepatan waktu pelaporan keuangan. Skor nilai penelitian ini merujuk pada skala likert, beberapa peneliti menganggap bahwa skala likert adalah skala pengukuran interval. Skala likert mempunyai atau lebih butir-butir pertanyaan yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor/nilai yang mempresentasikan sifat individu, misalkan sikap, pengetahuan dan perilaku.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketiga variabel, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel dependent (y), nilai variabel dependent berdasarkan nilai independent (x) yang diketahui. Dengan menggunakan regresi linier berganda maka akan mengukur perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Pengolahannya dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.983	3.346		1.788	.079
	PSAK	.198	.073	.345	2.703	.009
	SPI	.215	.097	.282	2.207	.031

Sumber data :data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan pembahasan analisis regresi berganda, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 5.983 + 0{,}198\ X_1 + 0{,}215\ X_2$$

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
   Tahapan yang dilakukan dalam uji t adalah :

   Tingkat signifikasi dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Tabel distribusi t dicari pada α = 5% dengan derajat bebas (db) dengan ketentuan db= n-2 atau 66 - 2=64 dari ketentuan tersebut t t_{tabel} sebesar **1,669**.

   Didasarkan dari hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar 2.703> t_{tabel} sebesar 1,299 (2.703>**1,669**) maka hipotesis diterima artinya Penerapan Standar Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah jika variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Keuangan meningkat maka Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah juga meningkat dan sebaliknya jika variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi menurun maka Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah juga menurun dengan tingkat kesalahan sebesar 5 %.

2. Sistem pengendalian internal
   Tahapan yang dilakukan dalam uji t adalah :

   Tingkat signifikasi dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Tabel distribusi t dicari pada α = 5% dengan derajat bebas (db) dengan ketentuan db= n-2 atau 66- 2=64 dari ketentuan tersebut t t_{tabel} sebesar **1,669**.

   Didasarkan dari hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar 2.207> t_{tabel} sebesar 1,299 (2.207>1,299) maka hipotesis diterima artinya sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah jika

variabel independen yaitu Sistem pengendalian intern meningkat maka Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah juga meningkat dan sebaliknya jika variabel independen yaitu Sistem pengendalian intern menurun maka Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah juga menurun dengan tingkat kesalahan sebesar 5 %.

Tabel 2. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	183.350	2	91.675	14.186	.000[a]
	Residual	407.135	63	6.462		
	Total	590.485	65			

Sumber data :data Primer Diolah, 2020

Tahapan yang dilakukan dalam uji F adalah :

Tingkat signifikasi dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Tabel distribusi F dicari pada α = 5% dengan df 1 (jumlah variabel) 3-1=2 dan df 2(n-k-l) 66-2-1= 63 maka diperoleh F_{tabel} = 3.99.

Didasarkan dari hasil perhitungan diperoleh angka F_{hitung} sebesar 14.186> F_{tabel} sebesar 3.99 (14.186 > 3.99) artinya Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah jika variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Sistem pengendalian intern meningkat maka Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah juga meningkat dan sebaliknya jika variabel independen Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Sistem pengendalian intern menurun maka Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dan Sistem pengendalian intern juga menurun dengan tingkat kesalahan 5%.

Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.557[a]	.311	.289	2.54214

Sumber data :data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3, diperoleh angka *R square* sebesar nilai 0,311 atau (31,1%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel penerapan standar akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap variabel Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah sebesar 31,1% sedangkan sisanya 68.9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara variabel Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Pinrang. Didasarkan dari hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar 2.207 > t_{tabel} sebesar 1,299 (2.207 > 1,299) maka hipotesis diterima artinya Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah jika variabel independen yaitu Sistem pengendalian intern meningkat maka Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah juga meningkat.

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku di indonesia. Standar tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemeintahan adalah syarat mutlak yag harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010).

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara standar akuntansi pemerintahan dengan ketepatan waktu laporan keuangan memiliki hubungan yang positif. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai sig.= 0,009 dengan *Level of Significant*= 5%, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh antara standar akuntansi pemerintahan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dalam dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Keteptan waktu laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Mahaputra dan Putra, 2014).

Dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa laporan keuangan Badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pinrang salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan yang baik hal ini dilihat dari capaian yang telah di dapat yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dalam konteks teori kepatuhan (compliance theory), pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah menerapkan sistem pengendalian intern (SPI). Sistem pengendalian intern ini membantu pengelola keuangan untuk meminimalisasi kesalahan yang bisa saja terjadi dalam pembuatan laporan keuangan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga membuat laporan keuangan menjadi berkualitas.

Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai akan membuat laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu dengan memenuhi kualitas pelaporannya sesuai dengan sistem dan standar yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menegaskan agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraeni (2015) yang membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian pengaruh penerapan standar akuntansi keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu laporan keuangan daerah di Kabupaten Pinrang, terdapat beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Didasarkan dari hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar 2.703 > t_{tabel} sebesar 1,299 (2.703 > 1,669) maka hipotesis diterima artinya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan jika variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah meningkat maka

Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah juga meningkat dan sebaliknya jika variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi menurun maka Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah juga menurun dengan tingkat kesalahan sebesar 5 %.

2. Didasarkan dari hasil perhitungan diperoleh angka t_{hitung} sebesar 2.207 > t_{tabel} sebesar 1,299 (2.207 > 1,299) maka hipotesis diterima artinya Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah jika variabel independen yaitu Sistem pengendalian internal meningkat maka Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Daerah juga meningkat dan sebaliknya jika variabel independen yaitu Sistem pengendalian intern menurun maka Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Daerah juga menurun dengan tingkat kesalahan sebesar 5 %.

Saran

Mengacu pada simpulan yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi saran penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi instansi pemerintah daerah agar melakukan evaluasi secara berkesinambungan mengenai pengendalian intern, dan pengawasan pelaporan keuangan daerah dalam ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini hanya memahami ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah hanya dari aspek pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah dengan pengujian pada satu wilayah kabupaten sehingga memiliki generalisasi yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir. 2011. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Manajemen Akuntansi Volume 12 Nomor 1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

Afiyanti, Yati & Rachmawati, Imami Nur. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Riset Keperawatan. Jakarta: Rajawali Press.

Baiq Dwi Apryana Eristanti. 2019. Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Ketepatanwaktu Pelaporan Keuang. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Nusa Tenggara Barat. Indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.1.Januari (2019): 622-650

Bungin, M. Burhan. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa. Jakarta: Kencana.

Drama, Harken. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian intern sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok). Jurnal Akuntansi, 2 (2), Universitas Negeri Padang.

Eristanti, Baiq Dwi Apyana, Hermanto, I Nyoman Nugraha Ardana Putra. (2019). Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan. *Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26 (1). 622-650.

Farhan, D., & Muawanah, U. (2022). The Effect of Good Corporate Governance on Firm Value With Profitability as Moderating. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(2), 192-200.

Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.

Husein, Umar. 2008. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada

Kadek Pande Astrawan, Dkk. 2016. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Kabupaten Buleleng. Jurusan Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja, Indonesia. E-Journals*1 Ak* Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan *Akuntansi Program S1*(Volume Xx Nomor Yy Tahun 2016)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah

Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal

Ridha, M.A dan H.Basuki.2012. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. 20-23 September 2012

Rosalin, Faristina dan Warsito Kawedar. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pad BLU di Kota Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Sella Rachmawi, Rini, Yessi Fitri. 2016. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi. Volume 9 (1), April 2016. P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190. Page 143 – 160

Sukmaningrum, T. 2012. –Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.‖ *Skripsi.*Universitas Diponegoro.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah